

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu bagian inti dari pelaksanaan demokrasi moderen. Demokrasi moderen juga menuntut adanya sistem keterwakilan, baik keterwakilan kepada pemerintah melalui institusi perwakilan rakyat maupun keterwakilan aspirasi masyarakat melalui institusi kepartaian.¹ Keduanya saling berkaitan, pasalnya untuk masuk institusi perwakilan rakyat harus melalui sebuah wadah yaitu institusi kepartaian atau partai politik. Dengan begitu, peran partai politik dalam menghasilkan kader terbaik menjadi sebuah keharusan.

Pada institusi perwakilan rakyat untuk mengantarkan kadernya, partai politik beserta calon harus berkompetisi dengan calon dari partai politik lain dalam arena pertarungan yang disebut pemilihan umum. Pertarungan ini hanya menghasilkan calon yang mendapatkan suara tertinggi yang menjadi pemenang. Pemilihan umum sendiri merupakan sarana paling damai untuk mengganti para penguasa. Penguasa yang dimaksud baik dalam lembaga Eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati, serta Walikota maupun dalam lembaga Legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat 1, 2 dan 3 serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

¹ Ainur Rofieq. 2011. Fungsi Rekrutmen Politik pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009. *Governance*. Vol. 1 No. 2. Hal. 65-81.

Pemilihan umum di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tercatat sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah melaksanakan 12 kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, baik yang dilaksanakan dengan memakai sistem proporsional tertutup maupun dengan memakai sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatifnya.² Saat ini bangsa Indonesia juga telah selesai melaksanakan pemilihan umum yang ke 13 pada tahun 2024. Semua lini telah selesai melaksanakan pemilu kali ini dengan semaksimal mungkin, baik dari pemerintah melalui penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun para partai politik sebagai peserta pemilu yang telah mengantarkan para kader terbaiknya untuk maju pada pemilihan.

Pada pemilihan umum inilah peran partai politik sangat strategis di dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.³ Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik untuk memilih pemimpin internal partai maupun dalam memilih pemimpin nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai politik yang mempunyai kesempatan

² Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 158 – 160.

³ Ainur Rofieq. 2011. Fungsi Rekrutmen Politik pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009. *Governance*. Vol. 1 No. 2. Hal. 65-81.

lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional dan memenangkan pemilu.

Partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka partai politik pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan berbagai cara seperti mendirikan organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, dengan tujuan agar kesempatan untuk berpartisipasi lebih diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai politik, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.⁴ Dari rekrutmen politik ini partai politik dituntut untuk menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat melalui mekanisme perekrutan kader yang baik. Ini menjadi salah satu tugas pokok bagi partai politik di dalam menyediakan kader-kader yang berkualitas serta berintegritas untuk duduk mewakili rakyat dalam lembaga legislatif seperti DPR.

Pemilihan umum tahun 2024 juga diikuti oleh beberapa partai politik baru yang pertama kali mengikuti kontestasi pemilu sebagai peserta pemilu. Partai Politik baru ini belum banyak pengalaman dan masih banyak belajar serta masih meraba-raba dalam pemilu ini. Partai politik baru tersebut berjumlah sebanyak

⁴ Ridho Ferdian, dan kawan-kawan. 2020. Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai. *Jurnal Wacana Publik*. Vol. 14 No. 01. Hal. 35-40.

lima partai antara lain Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia), Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).⁵ Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, khususnya setiap daerah Kabupaten / Kota tidak ada partai baru yang sanggup memenuhi kuota setiap dapil pada pemilihan Legislatif yang ada. Fenomena yang menarik ini memunculkan minat peneliti untuk meneliti fenomena ini berdasarkan hasil penelusuran terhadap studi yang membahas rekrutmen politik.

Penelitian terdahulu yang membahas partai politik sebagai sarana fungsi rekrutmen politik sudah ada sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Gamayel Paulus Aruan, dan kawan-kawan (2022) yang berjudul “Rekrutmen Politik pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I)” didapatkan hasil bahwa rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh Partai PSI Jawa Barat dilakukan secara terbuka dengan beberapa tahap yaitu pendaftaran dan penilaian. Untuk penilaian terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi kompetensi, dan evaluasi sosialisasi. Terakhir tahap penetapan yang dilakukan secara msuyawarah melalui rapat harian partai di dalam internal partai PSI itu sendiri.⁶

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nonong Asrina, dan kawan-kawan (2019) yang berjudul “Sistem Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Kandidat Calon Anggota Legislatif Menjelang Pemilu Legislatif 2019

⁵ Eko Kurniawan, 2018. Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”. Diakses pada 12 Maret 2024 Pukul 15.30 dengan link: <https://sumbarprov.go.id/home/news/13813--nomor-urut-partai-politik-peserta-pemilu-tahun-2019>

⁶ Gamayel Paulus Aruan, dan kawan-kawan. 2022. “Rekrutmen Politik pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I)”. *Muqoddimah*. Vol. 6 No. 1. Hal. 47-59.

(Studi Kasus: di DPW PSI Aceh)” didapatkan hasil bahwa Partai PSI DPW Aceh melakukan rekrutmen secara terbuka dengan dua jalur yaitu jalur kemampuan dan kaderisasi untuk calon legislatifnya. Jalur kemampuan dibuka untuk masyarakat umum yang memiliki potensi yang dapat meningkatkan suara partai. Jalur kedua jalur kaderisasi yaitu kader-kader yang dibina dan dipersiapkan untuk dicalonkan dalam pemilihan legislatif.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Agustiani Sianturi (2015) yang berjudul “Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (*Strengthening the Recruitment Function of Political Party*)” disebutkan bahwa proses rekrutmen politik dari partai politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak objektif.⁸ Dari ketiga penelitian tersebut di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai calon-calon legislatif yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), apakah sudah melalui mekanisme kaderisasi partai secara profesional atau belum, maka dari itu peneliti meneliti permasalahan ini.

⁷ Nonong Asrina. 2019. “Sistem Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Kandidat Calon Anggota Legislatif Menjelang Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: di DPW PSI Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH*. Vol. 4 No. 1. Hal. 1-12.

⁸ Kristina Agustiani Sianturi. 2015. “Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (*Strengthening the Recruitment Function of Political Party*)” *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara*. Hal. 1-22.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024. Pemilihan pada kali ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri diikuti oleh 19 Kabupaten / Kota termasuk Kota Padang sebagai lokasi penelitian peneliti saat ini.

Selanjutnya pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 kali ini diikuti oleh 18 partai politik sebagai peserta pemilihan umum seperti ditampilkan pada data berikut :

Tabel 1.1 Partai Peserta Pemilu 2024

No Urut	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	PDI-Perjuangan
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5	Partai Nasional Demokrat	NasDem
6	Partai Buruh	BURUH
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11	Partai Garda Republik Indonesia	GARUDA
12	Partai Amanat Nasional	PAN
13	Partai Bulan Bintang	PBB
14	Partai Demokrat	PD
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
24	Partai Ummat	UMMAT

Website : KPU RI

Dari 18 partai yang ada dalam tabel di atas, ada lima partai politik peserta pemilu yang baru pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2024 yaitu diantaranya Partai Buruh dengan nomor urut 6, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

dengan nomor urut 7, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan nomor urut 9, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) dengan nomor urut 11, dan Partai Ummat dengan nomor urut 24.

Di Provinsi Sumatera Barat, untuk pemilihan legislatif, kelima partai tersebut tidak mengisi semua kuota pencalonan untuk 19 daerah Kabupaten/Kota secara penuh yang ada di Sumatera Barat seperti ditampilkan pada data berikut :

Tabel 1.2 Keterisian Pileg di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Nama Partai	Jumlah Keterisian (dari 19 Kab/Kota)	Persentase (dalam %)	Keterangan
Gelora	17	89,47	Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto yang tidak terisi
Buruh	15	78,94	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto yang tidak terisi
Ummat	15	78,94	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, dan Kota Solok yang tidak terisi
Garuda	3	15,78	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang yang terisi
PKN	3	15,78	Kabupaten Sijunjung, Kota Padang, dan Kota Solok yang terisi

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari DCT Caleg 19 Kabupaten/Kota

Dari data di atas, partai Garuda dan partai PKN yang paling rendah dalam hal pemenuhan kuota pencalonan per dapil (daerah pemilihan) di Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan legislatif tahun 2024 dengan perolehan 15.78 %. Tercatat dua partai ini hanya mampu memenuhi kuota 3 daerah dari 19 daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk Partai Garuda, pada

daerah pencalonan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang mereka sanggup memenuhi kuota caleg (calon legislatif) setiap dapil yang ada di tiga daerah tersebut, sedangkan untuk Partai PKN tidak mampu memenuhi kuota caleg setiap dapil yang ada di 3 daerah seperti Kota Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, seperti ditampilkan pada data berikut :

Tabel 1.3 Keterisian Dapil Partai Garuda dan Partai PKN

Nama Partai	Daerah	Jumlah Dapil	Keterisian Partai
Garuda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4	4
	Kabupaten Lima Puluh Kota	5	5
	Kota Padang	6	6
PKN	Kota Solok	2	2
	Kabupaten Sijunjung	3	1
	Kota Padang	6	2

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari DCT Caleg 19 Kabupaten/Kota

Partai Garuda sanggup memenuhi kuota caleg per dapil di 3 daerah tersebut, sedangkan partai PKN hanya mampu memenuhi kuota caleg per dapil sebanyak 1 dari 3 daerah yang ada yang terdapat pada daerah Kota Solok. Di Kota Solok dari 2 dapil yang tersedia partai PKN mampu memenuhi kuota caleg per dapil. Sedangkan Kabupaten Sijunjung, dari 3 dapil yang ada, partai PKN hanya mampu memenuhi kota caleg per dapil sebanyak 1 dari 3 dapil yang ada. Lebih memprihatinkan lagi di Kota Padang, dari 6 dapil yang ada, partai PKN hanya mampu memenuhi kuota caleg per dapil sebanyak 2 dapil yang terdapat pada dapil Padang 3 dan dapil Padang 6. Artinya partai PKN di Kota Padang lebih banyak mengalami kekosongan caleg per dapil yaitu 4 dapil dibanding Kabupaten

Sijunjung yang mengalami kekosongan caleg per dapil di 2 dapil saja. kesimpulannya partai PKN Kota Padang jumlah keterisian dapil nya lebih kecil dari Partai PKN Kabupaten Sijunjung.

Apabila ditelisik lebih jauh dari lima partai baru yang ada maka partai PKN lah yang memiliki persentase kuota caleg per dapil paling rendah pada Pileg 2024 untuk daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dibanding dengan partai baru yang lain. Berangkat dari data yang telah peneliti paparkan di atas, maka dari itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Padang dengan partai PKN sebagai objek penelitian.

Seperti yang dibahas sebelumnya, pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kota Padang sendiri terbuka untuk 6 daerah pemilihan (Dapil) dengan 45 total kursi yang akan diperebutkan seperti ditampilkan pada data berikut :

Tabel 1.4 Daerah Pemilihan Legislatif Kota Padang

NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP 1 PADANG meliputi Kecamatan :		10
	1.1 Koto Tangah	198.568	
2	DP 2 PADANG meliputi Kecamatan :		7
	2.1 Kuranji	146.872	
3	DP 3 PADANG meliputi Kecamatan :		6
	3.1 Lubuk Kilangan	57.362	
	3.2 Pauh	62.422	
4	DP 4 PADANG meliputi Kecamatan :		7
	4.1 Bungus Teluk Kabung	27.857	
	4.2 Lubuk Begalung	122.796	
5	DP 5 PADANG meliputi Kecamatan :		7
	5.1 Padang Selatan	61.816	
	5.2 Padang Timur	80.310	
6	DP 6 PADANG meliputi Kecamatan :		8
	6.1 Padang Barat	43.598	
	6.2 Padang Utara	58.184	
	6.3 Nanggalo	59.875	
	Jumlah	919.660	45

Sumber : KPU Kota Padang

Dapat dilihat dari data di atas bahwa pemilihan legislatif tahun 2024 akan diikuti oleh 11 kecamatan di Kota Padang dengan jumlah alokasi kursi per dapil mengikuti jumlah penduduk. Idealnya pada pileg ini partai politik mengusung calonnya di semua dapil di suatu wilayah untuk meningkatkan peluang kemenangan. Namun hal yang sama tidak ditemukan pada partai politik baru seperti partai PKN Kota Padang. Partai ini hanya mengusung calon sebanyak 6 orang di dua dapil yang berbeda dengan jumlah 3 orang per dapil dengan rincian 2 laki-laki dan 1 perempuan⁹ seperti ditampilkan pada data berikut :

Tabel 1.5 Daftar Calon Legislatif Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Padang

NO	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan
1	Boyneldi	Laki-laki	Padang 3
2	Novelis, S.H.	Laki-laki	Padang 3
3	Devi Asriyanti	Perempuan	Padang 3
4	Aldo Jefri	Laki-laki	Padang 6
5	Wiwing Permata Putra, S.T.	Laki-laki	Padang 6
6	Sri Gusniar	Perempuan	Padang 6

Sumber : DCT KPU Kota Padang

Data ini menunjukkan ketidakmampuan partai PKN di dalam memenuhi kuota semua dapil yang mengindikasikan proses rekrutmen politik yang dilakukan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak banyak kader yang bisa dicalonkan alias kekurangan anggota. Kader-kader partai merupakan cerminan dari sebuah partai, jika partainya melakukan rekrutmen politik secara profesional maka akan melahirkan kader-kader yang berkualitas yang siap memenangkan pemilu.

⁹ Wawancara dengan Bapak Pimpinan Cabang PKN Kota Padang Wiwin Permata Putra, S.T. pada 31 Oktober 2023 Pukul 19.00 WIB di V Coffee Kota Padang

Peneliti menemukan dari data tersebut pada pencalonan legislatif partai PKN tidak mampu mengisi semua kuota keterisian setiap dapil yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa rekrutmen secara terbuka yang dilakukan oleh sebuah partai pun tidak menjamin bahwa partai tersebut akan memiliki cukup kader yang siap dicalonkan pada setiap pemilihan yang ada.

Partai PKN sendiri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kaderisasi kepada setiap anggota partainya yang mengikuti Pileg di Kota Padang.¹⁰

“Nah untuk semua caleg apakah mengikuti kaderisasi? Tentu mengikuti. Jadi memang PKN ini ada di dua dapil, dapil 3 dan dapil 6 Kota Padang. Semuanya itu alhamdulillah kader kita sendiri dan mengikuti proses dari awal pendaftaran hingga ke silon di KPU ini, semuanya mengikuti sistem pengkaderan”.

Menurut Keterangan Wiwin Permata Putra tersebut, dapat dikatakan bahwa PKN telah melaksanakan kaderisasi pada setiap anggotanya yang menjadi caleg Kota Padang. Pendapat ini memuat pesan bahwa Partai PKN telah melaksanakan kaderisasi dengan baik. Akan tetapi menurut peneliti ini menjadi rancu ketika apa yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang partai PKN Kota Padang tersebut dibandingkan dengan kenyataannya dilapangan sangat jauh berbeda. Pasalnya jika PKN telah melaksanakan kaderisasi dengan baik, mestinya mereka bisa memenuhi semua dapil Kota Padang yang berjumlah 6 dapil, akan tetapi pada faktanya mereka hanya mampu mengisi 2 dari 6 dapil yang ada dan tidak bisa memenuhi semua dapil tersebut.

¹⁰ *ibid*

Bersamaan dengan hal tersebut, dilihat pada ideologi partai PKN ini memiliki perbedaan dengan ideologi yang secara umum berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dalam hal ini ideologi partai yang dibawa oleh partai PKN ini berbasis ideologi nasionalis yang sangat bertolak belakang dengan ideologi masyarakat di Sumatera Barat yang menganut ideologi agamis. Hal ini juga menjadi tantangan bagi partai PKN sendiri seperti yang disampaikan oleh pimpinan cabang partai PKN Kota Padang.

Ketidaksiap-siapan partai dalam melakukan pengelolaan partai juga menjadi salah satu penyebab kaderisasi tidak terlaksana. Hal ini terjadi karena satu faktor yang menjadi *entry poin* penelitian ini yaitu masalah keuangan atau dana. Alhasil partai PKN mengikuti pemilihan legislatif hanya untuk dikenal oleh masyarakat, untuk wadah sosialisasi partai PKN kepada publik, bukan untuk berkompetisi apalagi untuk menang.

Pada penelitian ini peneliti fokus meneliti rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai PKN. Peneliti akan meneliti rekrutmen politik seperti apa yang dilakukan oleh partai PKN dimulai dari poin sistematis pelaksanaan lanjut pada poin proses serta terakhir poin prosedur yang dilakukan partai PKN Kota Padang dimulai dari awal perekrutan hingga pendaftaran calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Menurut Hazan dan Rahat dalam teori rekrutmen politik disampaikan bahwa ada empat poin yang perlu dijadikan fokus dalam melakukan rekrutmen politik yaitu siapa kandidat yang dinominasikan, siapa yang menyeleksi, dimana kandidat diseleksi dan bagaimana kandidat diputuskan. Perlu dilihat pada

fenomena, apakah rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai PKN sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti paparkan di atas, peneliti berasumsi bahwa sistem atau pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan data dari DCT Caleg KPU Kota Padang bahwa partai PKN tidak mengusung calon legislatifnya di semua dapil. Maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Permasalahan Rekrutmen Politik Partai Kebangkitan Nusantara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Masalah Rekrutmen Politik Partai Kebangkitan Nusantara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis :

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat menjelaskan fungsi rekrutmen pada partai politik baru sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah referensi atau khazanah hasil studi untuk penelitian serupa bertema fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam hal rekrutmen politik bagi partai politik baru khususnya bagi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada pemilihan legislatif berikutnya.

